

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan objek vital dalam kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan pendidikan serta berhak mendapatkan apa yang diharapkan untuk perkembangan hidupnya. Bicara mengenai pendidikan tidak akan ada habisnya, karena pada dasarnya pendidikan adalah salah satu jalan panjang yang ditempuh oleh manusia dalam mencari kearifan dan kebenaran (Alpian, dkk, 2023). Pendidikan secara umum memiliki makna sebagai suatu proses untuk mendapatkan kehidupan yang mulia, sehingga menjadi seorang pendidikan atau terdidik merupakan penghargaan yang harus disyukuri oleh manusia (Omeri, 2015). Peran manusia dalam pendidikan sangat krusial, manusia membutuhkan pendidikan untuk memberikan kebermanfaatan bagi dirinya sendiri, dan juga lingkungannya (Sahroni, 2017). Lingkungan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat berada dalam skala yang lebih kecil, dan terbagi dalam tiga kategori: informal (di rumah), formal (di sekolah), dan nonformal (di masyarakat). Sejak pembuahan hingga kematian, seseorang menerima pendidikan, baik yang disengaja maupun tidak, melalui pengalaman sehari-hari. Anak-anak dan orang tuasama-sama sangat bergantung pada keluarga mereka sebagai landasan pembelajaran seumur hidup (Syaadah, dkk., 2022).

Sekolah sebagai lembaga formal yang disediakan oleh pemerintah memiliki tugas sebagai sarana untuk mendidik. Peran sekolah sangat krusial bagi pengembangan intelektual peserta didik, sehingga dalam hal ini, peran guru berupaya untuk mencerdaskan peserta didik dalam segala aspek kehidupan (Husti, 2022). Dengan begitu, pendidikan formal dalam hal ini menjadi wadah untuk peserta didik dan guru untuk memberikan kualitas dalam membentuk sumber daya manusia yang moderat. Menurut Syaparuddin & Elihami (2020) salah satu tujuan utama pendidikan nonformal adalah membantu peserta didik memahami kehidupan bermasyarakat dengan cara membantu mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Secara umum, belajar dapat dipandang sebagai suatu fase di mana semua perilaku individu yang relatif permanen mengalami perubahan sebagai akibat dari paparan dan keterlibatan dengan lingkungannya, termasuk proses

kognitif (Nahar, 2016). Selain memberikan pengetahuan, peran guru adalah menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat belajar secara aktif dan menerapkan apa yang telah dipelajarinya, yang pada akhirnya membuat mereka percaya pada kemampuannya sendiri (Buchari, 2019; Ilyas, 2018).

Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang siap menghadapi masa depan dan mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas. Bidang ilmu pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu yang paling banyak diterapkan, dengan tujuan untuk membentuk pertumbuhan pribadi dan akademik peserta didik. Karena pengaruhnya yang mendalam terhadap masa depan orang yang terdidik, maka mengajar merupakan suatu usaha yang menyentuh kebenaran dan kebijakan keberadaan manusia (Rahmat, 2019). Pendidikan merupakan kewajiban moral bagi guru karena dampak positifnya terhadap kehidupan siswa. Kemudian, pentingnya pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam hal ini pemerintah sangat berusaha untuk membangun kualitas pendidikan yang memadai, secara praktik ataupun teori. Maka dengan hal ini, pemerintah memiliki tugas mulia untuk dapat memberikan sumbangsih dan menyediakan layanan pendidikan yang terpenuhi dari tingkat dasar, menengah, bahkan tinggi. Atas dasar tersebut, maka pemerintah harus memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada ranah pendidikan, agar mutu pendidikan dapat meningkat dan masyarakat bisa merasakan dampak positif dari pendidikan secara luas. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang disengaja dan terorganisasi untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang interaktif bagi peserta didik dan pengajar, dengan tujuan memberdayakan peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, generasi warga negara yang bermoral baik akan dihasilkan melalui proses ini di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, pendidikan adalah lingkungan terstruktur tempat peserta didik dapat terlibat dan memperoleh informasi (Nudin, 2020).

Bagian akademik dan ekstrakurikuler sekolah harus memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Karena administrasi sekolah yang efektif merupakan tanda pemenuhan delapan standar pendidikan, yang pada gilirannya mengarah pada

pemenuhan persyaratan layanan pendidikan minimal, ini merupakan indikasi manajemen yang sangat baik dalam tindakan. Meningkatkan standar untuk instruksi kelas adalah tujuan akhir dari upaya ini. Sebagaimana terlihat dari proses manajemen pendidikan, fasilitas pendidikan, dan pendanaan pendidikan, tujuan pelaksanaan layanan pendidikan di sekolah dasar adalah untuk memenuhi Standar Layanan Pendidikan Minimal (Nabilla, dkk., 2024; Usman, 2016).

Sistem pendidikan nasional (sisdiknas) memasukkan sekolah dasar sebagai salah satu jenjang penyelenggaraannya. Landasan yang kokoh pada dasar-dasar yang telah ditetapkan di sekolah dasar menjadi landasan bagi keberhasilan akademis selanjutnya dan berdampak besar pada distribusi pendapatan tahunan (Jones, 2002). Kita semua hanya dapat bercita-cita untuk memiliki sekolah dasar yang bermutu tinggi. Dalam arti bahwa sekolah dasar memerlukan kerja keras dan pengorbanan, tidak ada sekolah dasar yang dapat menyediakan pendidikan yang baik dengan sendirinya. Terdapat korelasi yang kuat antara jumlah kerja keras dan pengorbanan yang diperlukan dengan mutu produk akhir. Dampak yang lebih besar pada jenis kompromi yang perlu dibuat diberikan oleh standar mutu yang lebih tinggi. Sistem pendidikan di sekolah lebih seperti komunitas kecil yang memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan akademis siswa daripada birokrasi yang rumit. Kegiatan-kegiatan di dalamnya membentuk satu kesatuan yang kohesif, dengan subsistem yang saling terkait, terkait, dan berdampak satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan.

Semua satuan pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang esensial. Delapan Standar Pendidikan Nasional (Apendi, 2018; Torro, 2016)—yang meliputi standar isi, prosedur, tenaga pengajar, sarana fisik, administrasi, pendanaan, penilaian efektivitas pendidikan, dan persyaratan kompetensi lulusan—menjadi dasar penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Pola pendidikan akan berubah akibat revolusi industri yang sangat menekankan pada teknologi dan perangkat terkaitnya. Hal ini akan memengaruhi cara siswa belajar dan cara orang dewasa memahami dan menggunakan informasi. Agar sistem pendidikan Indonesia tetap kompetitif di era digital modern, sistem pendidikan Indonesia

harus segera meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui pembelajaran interaktif dan mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui penggunaan media informasi dan komunikasi (Herlambang, 2021). Keterampilan teknis tentu diperlukan, tetapi demikian pula pelajaran yang mengajarkan anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, kooperatif, komunikatif, dan berkarakter. Peserta didik dari semua latar belakang dan lokasi harus memanfaatkan berbagai kegiatan pembelajaran tambahan untuk memastikan bahwa pengalaman kelas dan laboratorium mereka tidak hanya komprehensif tetapi juga menarik, merangsang, dan kaya konten (Rohim, 2019).

Dalam memastikan keberlangsungan operasi layanan pendidikan, perlu untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, instruktur, dan staf dan menerapkan proses manajemen yang kompeten (Wisda, 2021). Selain kurikulum, fasilitas pendidikan juga harus mendapat perhatian yang tepat, karena terdapat beberapa yang saat ini digunakan dengan cara yang tidak tepat. Diharapkan bahwa sekolah dapat menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan bagi siswa. Pasal 42, ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, mengenai persyaratan untuk fasilitas dan sarana pendidikan, menyatakan bahwa semua unit pendidikan harus memiliki fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran.

Segala sesuatu yang menjadi tumpuan para pengajar dan peserta didik dalam melaksanakan tugasnya di kelas merupakan bagian dari prasarana pendidikan (Devi, 2021). Ruang kelas, perabotan, perlengkapan, teknologi, peta, dan buku merupakan bagian dari prasarana pendidikan. Dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, peserta didik akan lebih mudah dalam belajar dan menyerap informasi yang diberikan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan dasar, wajib memenuhi 13 kriteria yang tertuang dalam Undang-undang Permendibudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Persyaratan Pelayanan Minimal. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, jelaslah bahwa diperlukan investigasi yang mendalam untuk mengetahui sumber permasalahan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana manajemen efektif dari guru dan

staf dapat meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di sekolah dasar. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia dengan kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks sekolah dasar di Indonesia, yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dengan fokus pada strategi praktis dan aplikatif dalam manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih konkret dan relevan bagi kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan standar pelayanan minimal dapat tercapai secara optimal.

Penelitian sebelumnya tentang standar pelayanan minimal cenderung berfokus pada sejauh mana sekolah melaksanakan ketentuan undang-undang, khususnya layanan pendidikan dasar (Basid, 2015; Haryati, 2014; Hidayati et al., 2013; Nababan & Hanafi, 2019; Purwanto & Purwanto, 2015; Setiawati, 2018; Victory, 2023; Wijanarti, 2016). Penelitian berjudul "Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dalam Perspektif Era Revolusi Industri 4.0 dan Implementasinya di SD Al Bayan Islamic School" yang dilakukan oleh Rohim (2019) mendukung interpretasi ini. Hasil penelitian menemukan bahwa semua sekolah memiliki standar pelayanan yang sangat buruk, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, penelitian difokuskan pada kriteria layanan minimal, khususnya kriteria kedelapan, yang menyatakan bahwa setiap instruktur harus memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum untuk setiap kelas. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Atminah, N. (2018) yang dikenal dengan "Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di SDN Harjowinangun 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak" mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana serta penilaian masih belum optimal untuk standar pelayanan minimal yang telah dirancang menurut undang-undang. Hal ini disebabkan karena masih banyak kurangnya sekolah-sekolah dalam melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya tersedia dalam menunjang pembelajaran serta kenyamanan di lingkup sekolah.

Realitanya, proses pelayanan pendidikan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharuskan oleh undang-undang tentang standar pelayanan minimal (Subki et al., 2022). Tidak tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada lembaga

pendidikan khususnya sekolah dasar menjadi salah satu hal yang mengakibatkan layanan tidak maksimal. Seperti halnya pada layanan peminjaman buku tetap dilaksanakan sebagai solusi dari ketidaktercapaiannya standar minimal. Hal tersebut selaras dengan data pra penelitian yang peneliti lakukan yaitu berkenaan dengan ketersediaan buku paket yang seharusnya satu buku untuk satu anak di tempat penelitian ternyata tidak seperti itu, sama pula dengan buku penunjangnya. Apalagi sekarang karena berganti kurikulum pengadaan buku masih proses dari awal lagi. Dari jumlah siswa 23 tersedia buku 10, dari siswa 41 buku 25. Saya tidak melihat bagaimana murid dapat memperhatikan dan mempelajari konten jika yang mereka lakukan hanyalah mendengarkan instruktur membacanya. Karena buku teks tersebut bukan milik murid, mereka harus mencari cara lain untuk menyelesaikan kegiatan, seperti memotong dan menempel dari sumber lain.

Seperangkat alat bantu dan materi pengajaran ilmiah termasuk model rangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia, contoh peralatan optik, perlengkapan sains untuk percobaan dasar, poster/bagan sains, dan materi terkait lainnya juga diperlukan oleh setiap institusi, menurut fakta lapangan. Pengamatan awal menunjukkan bahwa, rata-rata, sekolah yang menjadi lokasi studi tidak memiliki alat bantu pengajaran ilmiah atau memiliki alat bantu yang sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat digunakan. Tidak ada materi tambahan yang pernah digunakan oleh instruktur sekolah. Ada yang tersedia satu atau dua gambar/poster tapi tidak dapat mewakili untuk setiap materi dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut.

Perencanaan pembelajaran pada tingkat layanan minimal merupakan pokok bahasan dari standar layanan berikut yang sama pentingnya. Setiap pendidik mengikuti kurikulum khusus mata pelajaran yang menjadi dasar rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mereka. Berdasarkan hasil observasi awal para guru mengeluhkan adanya kendala dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Adapun kendala karena tidak bisa membagi waktu, tidak tersedia waktu luang karena padatnya kegiatan di luar jam pembelajaran. Selain itu juga ada yang masih bingung dalam penyusunannya, meskipun pada sekarang ini RPP masih tahap adopsi dari hasil orang lain. Bapak ibu guru mengatakan bahwa mereka bukan tidak menyusun RPP, tapi ada hasil mengunduh, tetapi belum diedit. Hal itu tetap

saja bapak/ibu guru dalam proses pembelajaran tidak menyusun RPP yang seharusnya dilakukan supaya proses belajar mengajar terarah dan terstruktur. Ada hal lain lagi dikarenakan kurangnya tersedia fasilitas untuk pencetakan file RPP, jadi bagaimana proses pembelajaran maksimal, proses pemenuhan standar pelayanan minimalnya pun belum tercapai.

Melihat kondisi tersebut, muncul pertanyaan siapa yang seharusnya bertanggungjawab? Crosby (1976) menyatakan bahwa pihak manajemenlah sebenarnya yang harus bertanggung jawab penuh terhadap : 1) Penentuan tujuandari lembaga tersebut; 2) Penentuan ukuran keberhasilan lembaga; 3) Penentuan strategi untuk mencapai tujuan. Kemudian, Juran (1994) menyebutkan bahwa lembaga jugalah yang harus bertanggungjawab terhadap munculnya berbagai inovasi dan “*controlling*”. Selanjutnya Heridiansyah (2014) menegaskan bahwa dalam organisasi 80% masalah muncul karena kesalahan manajemen dan 20% karena sumber daya manusia. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen pada tingkat pusat (makro), Dinas Pendidikan (*mezzo*) sampai pada tingkat sekolah (mikro). Pada tingkat mikro manajemen sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan semua sumber daya sekolah yang dimiliki termasuk guru yang merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Atas dasar berbagai alasan di atas, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana sekolah dasar dapat mencapai persyaratan layanan dasar melalui evaluasi manajemen mengenai penggunaan teknik pengelolaan guru dan personelnnya.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah dilakukan pembatasan permasalahan penelitian di atas, secara lebih spesifik dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketercapaian indikator standar pelayanan minimal sekolah dasar?
2. Bagaimana perencanaan pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar di wilayah kecamatan Sindangkasih ?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar di wilayah kecamatan Sindangkasih ?
4. Bagaimana penilaian pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar di wilayah kecamatan Sindangkasih?
5. Bagaimana permasalahan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi

permasalahan dalam pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar di wilayah kecamatan Sindangkasih ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai :

1. Untuk mengetahui indikator ketercapaian standar pelayanan minimal sekolah dasar, tentang ketersediaan buku teks yang telah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, ketersediaan satu set peraga dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
2. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar, tentang ketersediaan buku teks yang telah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, ketersediaan satu set peraga dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar tentang ketersediaan buku teks yang telah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, ketersediaan satu set peraga dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia(globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.
4. Untuk mengetahui penilaian pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar

pelayanan minimal sekolah dasar, tentang ketersediaan buku teks yang telah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, ketersediaan satu set peraga dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

5. Untuk mengetahui permasalahan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal sekolah dasar, tentang ketersediaan buku teks yang telah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik, ketersediaan satu set peraga dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar, dan poster /carta IPA, guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat secara praktis ataupun teoritis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ditemukannya beberapa prinsip tentang manajemen guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal di sekolah dasar.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para kepala sekolah dalam manajemen guru dan staf dengan menggunakan pendekatan yang efektif dan efisien.
- b. Memberikan semangat bagi siswa untuk lebih meningkatkan hasil belajarnya.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap aspek lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Kerangka pelaporan penelitian untuk judul "Manajemen Guru Dan Staf Guna Memfasilitasi Standar Pelayanan Minimal Di Sekolah Dasar"

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini penelitian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

2. Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi mengenai kajian teori mengenai konsep manajemen, dan standar pelayanan minimal sekolah dasar

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi mengenai penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan atau metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, teknik dan analisis data.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai temuan dan pembahasan dalam penelitian manajemen guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal di sekolah dasar

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dalam penelitian manajemen guru dan staf guna memfasilitasi standar pelayanan minimal di sekolah dasar